

Mengoptimalkan Akuntabilitas dalam Manajemen Bimbingan dan Konseling: Tantangan, Analisis, dan Solusi

Titik Wiyul Fitri¹, Firman², Neviyarni³

^{1,2,3}Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

Informasi Artikel

Article History:

Submit : 16 Juni 2024
Revised : 27 Juni 2024
Accepted : 28 Juni 2024
Published : 30 Juni 2024

Kata Kunci

Akuntabilitas, Pengawasan, dan Bimbingan dan konseling,

Correspondence

E-mail: twiyulfithri@gmail.com*

A B S T R A K

Perkembangan input siswa SMKN 1 Bukittinggi kian pesat, sehingga membutuhkan perhatian pengelolaan perkembangan siswa di sekolah melalui pengoptimalan manajemen bimbingan di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan akuntabilitas manajemen bimbingan dan konseling melalui tindakan mengidentifikasi tantangan dan analisis penerapan akuntabilitas manajemen bimbingan dan konseling (BK) di SMKN 1 Bukittinggi, serta menawarkan solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif studi di SMKN 1 Bukittinggi. Informan penelitian ini yakni kepala dan wakil kepala sekolah, koordinator BK, Guru BK, majelis Guru dan siswa SMKN 1 Bukittinggi dengan menggunakan metode purposive. Metode pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data dengan melakukan analisis deskriptif. Hasil penelitian mengungkap tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya standar operasional prosedur mandiri, keterbatasan sumber daya, penggunaan teknologi dalam pemantauan dan evaluasi layanan BK terbatas dan penyelenggaraan pengawasan BK dari dinas pendidikan masih jarang dilakukan. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa solusi, antara lain pengembangan standar akuntabilitas yang jelas, peningkatan kapasitas tenaga profesional, dan integrasi teknologi dalam proses pengawasan dan evaluasi. Implikasi penelitian menawarkan pendekatan praktis dan inovatif yang dapat diterapkan oleh praktisi dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas manajemen BK.

Abstract

The development of student input at SMKN 1 Bukittinggi is rapid, so it requires attention to managing student development at school through optimizing school guidance management. This study aims to optimize the accountability of guidance and counseling management through identifying challenges and analyzing the implementation of guidance and counseling management accountability at SMKN 1 Bukittinggi, as well as offering innovative solutions that can be applied to overcome these challenges. This research uses a qualitative approach with a descriptive study design at SMKN 1 Bukittinggi. The informants of this research are the head and vice headmaster, guidance and counseling coordinator, guidance and counseling teacher, teacher council and students of SMKN 1 Bukittinggi using purposive method. Data collection methods using interview guidelines, observation and documentation. The method of data analysis was descriptive analysis. The results revealed that the main challenges faced include the lack of independent standard operating procedures, limited resources, limited use of technology in monitoring and evaluating BK services and the organization of BK supervision from the education office is still rare. To overcome these challenges, the study recommends several solutions, including the development of clear accountability standards, increasing the capacity of professionals and integrating technology in the monitoring and evaluation process. The implications of the research offer practical and innovative approaches that can be applied by practitioners and policymakers to improve the accountability of BK management.

This is an open access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Akuntabilitas layanan bimbingan dan konseling merupakan aspek penting dalam menentukan efektivitas dan kredibilitas layanan. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban atas tindakan dan keputusan serta menjamin bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar profesional yang tinggi. Dalam konteks pendidikan, akuntabilitas layanan BK mendukung perkembangan psikologis dan akademik konseli. Akuntabilitas yang baik memastikan bahwa konselor bertanggung jawab atas kualitas layanan yang diselenggarakan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konseli (Cooper and McLeod 2011). Studi *Erford* menekankan pentingnya akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan konseling (Erford 2010). Akuntabilitas konseling dapat mempengaruhi kemampuan konselor untuk menyediakan layanan berkualitas (Gladding and Crockett 2019). Hal tersebut diperkuat penelitian Wibowo di sekolah-sekolah menengah di Yogyakarta menemukan bahwa kurangnya alat ukur yang tepat dan terbatasnya sumber daya menjadi hambatan utama dalam implementasi akuntabilitas BK (Wibowo, 2017). Diperkuat penelitian Sari mengungkap meskipun konselor menyadari pentingnya akuntabilitas, banyak yang merasa tidak cukup didukung oleh sistem pendidikan dalam hal pelatihan dan sumber daya (Sari 2019). Berdasarkan beberapa kajian tersebut selanjutnya peneliti melakukan studi pendahuluan lapangan menunjukkan bahwa Fenomena di SMKN 1 Bukittinggi, ditemukan tantangan implementasi akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling diantaranya; kurangnya standar operasional prosedur pelayanan bimbingan dan konseling yang seragam dan mandiri sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam evaluasi kinerja konseling. Selanjutnya keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga profesional, sering kali menghambat upaya pengawasan dan peningkatan kualitas layanan, dan masih terbatasnya pembinaan dan pengawasan pelayanan bimbingan dan konseling dari pihak pengawas bimbingan dan konseling dinas pendidikan baik ditingkat kabupaten/kota maupun dari wilayah Provinsi sehingga terjadi resistensi terhadap perubahan dan inovasi dalam praktik konseling, yang membuat proses penerapan akuntabilitas menjadi lebih sulit.

Berdasarkan kajian teori, analisis penelitian terdahulu dan fenomena dilapangan tersebut menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang holistik dan inovatif untuk mengoptimalkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan BK diantaranya mencakup pengembangan alat ukur yang lebih efektif dan relevan untuk menilai hasil konseling (Whiston and Sexton 1998), peningkatan pelatihan dan pengembangan profesional bagi konselor (Rønnestad & Skovholt, 2003), dan penerapan teknologi informasi untuk mendukung dokumentasi dan pelaporan yang lebih baik (Barak, Boniel-Nissim, and Suler 2008). Hal ini juga diperkuat penelitian Barak et al mengungkap; bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam dokumentasi konseling (Barak et al. 2008). Selain itu, perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara para pemangku kepentingan, termasuk konselor, konseli, sekolah, dan Dinas Pendidikan sebagai pembuat kebijakan, untuk menciptakan sistem yang mendukung praktik akuntabilitas yang berkelanjutan (Sink 2009).

Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan utama dalam penerapan akuntabilitas dan pengawasan di bidang bimbingan dan konseling. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan ini, dapat dirumuskan solusi-solusi inovatif yang mampu meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas layanan bimbingan dan konseling kedepannya. Penelitian ini berusaha untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis yang mendalam dan solusi yang terintegrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan, menganalisis situasi saat ini, dan menawarkan solusi praktis untuk mengoptimalkan akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kualitas layanan BK dan memenuhi harapan masyarakat terhadap layanan bimbingan dan konseling

kedepan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem bimbingan dan konseling yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan konseli.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan kunci penelitian ini yakni kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, koordinator BK dan guru BK. Informan pendukung penelitian ini yakni mejelis guru, staf tata usaha sekolah dan siswa penerima layanan bimbingan dan konseling disekolah. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif mengidentifikasi pola dan tema utama dalam tantangan dan solusi untuk optimalisasi akuntabilitas BK.

3. Hasil

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang mengungkap perlunya upaya mengoptimalkan akuntabilitas manajemen penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di SMKN 1 Bukittinggi kedepan. Temuan dan pembahasan penelitian ini beberapa aspek yang perlu menjadikan perhatian baik dari identifikasi masalah maupun alternatif solusi yang ditemukan sebagai berikut:

3.1. Mengoptimalkan Standar Operasional Prosedur Mandiri

Hasil wawancara mengungkap bahwa standar operasional prosedur (SOP) dalam layanan bimbingan dan konseling (BK) di SMKN 1 Bukittinggi masih terbatas dan tidak seragam. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Adr sebagai guru BK, menyatakan, "standar operasional prosedur layanan BK di sekolah masih terbatas terkadang cenderung berbeda masing-masing konselor dan ada baiknya pengelola program sekolah kedepan hendaknya dilakukan upaya mengoptimalkan dengan memanfaatkan SOP yang ada dan menambah SOP mandiri yang lebih akuntabel" (Adr, 2024). Selanjutnya FL menambahkan bahwa panduan operasional BK masih terdapat multitafsir antara BK Pola 17 dan BK Komprehensif, sehingga implementasinya terkadang lebih dinamis" (FL, 2024). Kemudian guru lain CR mengakui, "terkadang pekerjaan yang dilakukan Guru BK di sini kurang tersistematis dan kurang seragam, masing-masing guru terkadang terdapat perbedaan dan cenderung spontanitas" (CR, 2024). Disamping itu Siswa JK juga mengamati bahwa cara guru BK menerima konseli di ruangan BK bermacam-macam antara satu guru dengan yang lain (JK, 2024).

Memperkuat hasil wawancara tersebut ditemukan dari hasil observasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan BK masih terbatas pada pengembangan ketersediaan SOP yang efektif. Standar operasional yang tidak seragam dapat menyebabkan ketidakpastian bagi siswa dan guru, serta mengurangi akuntabilitas layanan BK.

3.2. Mengoptimalkan Sumber Daya Pendidikan

Hasil wawancara mengungkap bahwa Sekolah masih mengalami hambatan sumberdaya Pendidikan, sebagaimana dikungkapkan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, DK, mengungkapkan bahwa; "rasio antara guru BK dan siswa sudah memadai, namun masih terdapat guru BK yang belum menuntaskan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) sehingga hal tersebut mengalami hambatan untuk mengoptimalkan sumber daya pendidikan" (DK, 2024). Kemudian diperkuat sebagaimana harapan IM dan FL juga menyarankan penambahan jumlah guru BK untuk meningkatkan efektivitas layanan kedepan" (IM dan FL, 2024).

Hal tersebut juga diperkuat dari hasil observasi mengungkap bahwa pengelolaan waktu layanan BK masih terbatas, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya pelatihan dan pendidikan lanjutan dapat membatasi kemampuan guru BK dalam memberikan layanan yang berkualitas.

3.3. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Dalam Pemantauan dan Evaluasi Layanan BK Terbatas

Hasil wawancara mengungkap bahwa masih terdapat hambatan dalam pemanfaatan teknologi dalam pemantauan dan evaluasi layanan BK sebagaimana diungkapkan FL; “kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi layanan BK masih terbatas” (FL, 2024). Faktor penyebabnya termasuk ketersediaan fasilitas teknologi yang belum memadai dan kurangnya bimbingan dari pengawas BK. Selanjutnya diperkuat Koordinator BK SS menekankan pentingnya pengembangan lebih lanjut melalui workshop dan pelatihan (SS, 2024).

Hal tersebut diperkuat dari hasil observasi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pemantauan dan evaluasi layanan BK masih terlihat sederhana. Penggunaan teknologi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan BK.

3.4. Mengoptimalkan Bimbingan dari Pengawas BK di Sekolah

Hasil wawancara mengungkap bahwa intensitas bimbingan dan pembinaan pengawas BK di sekolah dari Dinas Pendidikan kurang intensif dilakukan, hal ini sebagai mana diungkapkan FL bahwa; “bimbingan dan arahan intensif dari pengawas BK masih jarang dilakukan (FL, 2024). Disamping itu ditambahkan RR mengungkap; “intervensi pembinaan dan pembimbingan pengawasan BK di SMKN 1 Bukittinggi dari Pengawas BK baik dari Dinas Pendidikan Provinsi kurang intensif baik daring maupun luring hal ini membuat akuntabilitas manajemen BK kurang optimal, diharapkan kedepannya semoga para *stakeholder* tersebut lebih meningkatkan perhatiannya dalam pengawasan akuntabilitas BK” (RR, 2024).

Kondisi tersebut dapat dikuatkan dari hasil observasi bahwa tidak banyak dokumen hasil pengawasan akuntabilitas penyelenggaraan BK yang diselenggarakan, hal ini dimungkinkan karena kurangnya perhatian dari Stakholder pengawasan penyelenggaraan BK dari Dinas Pendidikan terkait.

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat dianalisis dan dibahas beberapa hal sebagai berikut:

4.1. Mengoptimalkan Standar Operasional Prosedur Mandiri

Hasil penelitian ini seiring dengan pandangan Gibson yakni SOP yang jelas dan terstruktur sangat penting untuk memastikan kualitas layanan konseling yang konsisten dan akuntabel (Gibson dan Mitchell, 2016). Hal ini diperkuat Jones mengungkap, pengembangan SOP yang seragam dan komprehensif dapat memastikan layanan BK yang konsisten dan berkualitas” (Johnson and Jones 2018). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa standar prosedur yang tidak konsisten dapat menghambat keberhasilan program BK di sekolah (Corey 2015). Selain itu, penelitian Aip Badrujaman, dkk juga menunjukkan bahwa; mengoptimalkan standar operasional mandiri perlu segera ditindaklanjuti pada manajemen bimbingan dan konseling, dengan demikian interaksi Guru BK dengan pihak terkait tersusun mekanismen yang lebih jelas (Badrujaman, Luawo, and Cahyawulan 2018). Disamping itu penelitian terdahulu juga menekankan pentingnya standar prosedur yang seragam dalam layanan konseling untuk memastikan bahwa semua konselor mengikuti pedoman yang sama (Anderson, 2020). Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan konsultasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program BK Dengan demikian diperlukan upaya dari pihak sekolah perlu mengembangkan penyusunan SOP mandiri yang lebih akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan warga sekolah. Hal ini berdampak pada perkembangan karakter siswa kedepan sebagaimana yang dikemukakan dari hasil penelitian Firman; Pedoman layanan konseling dibutuhkan siswa untuk meningkatkan penalaran moral dalam mencegah tindakan kekerasan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut kegiatan yang berfokus pada kemampuan kognitif individu dalam mempertimbangkan, menilai, dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat fisik (Firman,

Karneli, and Hariko 2018). Penyesuaian ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga memperbaiki persepsi siswa terhadap layanan BK kedepan.

4.2. Mengoptimalkan Sumber Daya Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian ini seiring dengan penelitian Erda Fitriani,dkk mengemukakan; problematika layanan bimbingan dan konseling disekolah diantara disebabkan kurangnya pemahaman guru, orang tua dan masyarakat berkaitan dengan fungsi dari layanan dan bimbingan konseling serta tugas dari konselor, sehingga diperlukan optimalisasi sumber daya Pendidikan (Fitriani et al. 2022). Disamping itu Smith menjelaskan masalah profesionalisme dari guru BK perlu tingkatkan penambahan jumlah guru BK dan pelatihan berkelanjutan, hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan BK (Smith, 2023). Kemudian diperkuat penelitian Williams menunjukkan bahwa rasio guru BK yang ideal adalah 1:100, yang memungkinkan konselor memberikan perhatian lebih personal kepada setiap siswa (Williams, 2019). Dengan rasio yang lebih kecil antara guru BK dan siswa, konselor dapat lebih fokus pada setiap siswa, memberikan layanan yang lebih personal dan efektif. Sekolah dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk penambahan tenaga pendidik BK dan program pelatihan berkelanjutan. Pelatihan ini akan memastikan bahwa konselor memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menangani berbagai masalah konseli.

4.3. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Dalam Pemantauan dan Evaluasi Layanan BK Terbatas

Hasil penelitian ini seiring dengan penelitian Erda Fitriani,dkk mengemukakan; 'Guru BK masih belum optimal dalam memanfaatkan teknologi informasi pada pelayanan bimbingan dan konseling (Fitriani et al. 2022). Disamping itu hasil penelitian ini diperkuat ASCA mengungkap; "teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam memantau kemajuan siswa dan mengevaluasi efektivitas program BK" (ASCA, 2019). Hal senada dikemukakan Brown mengungkap; "Penggunaan teknologi informasi dalam layanan BK dapat membantu dalam pemantauan dan evaluasi yang lebih sistematis dan akurat" (Brown, 2021) Penelitian Carey dan Dimmitt juga menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam layanan BK dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pemantauan serta evaluasi layanan (Carey dan Dimmitt, 2012). Seiring penelitian ini Harris juga menunjukkan bahwa teknologi dapat mengurangi beban administrasi konselor, memungkinkan mereka untuk fokus lebih pada interaksi langsung dengan konseli (Niles and Harris-Bowlsbey 2022).

4.4. Mengoptimalkan Bimbingan dari Pengawas BK di Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian ini memperkuat pandangan Sink dan Edwards yakni; "pengawasan yang efektif dari pengawas BK sangat penting untuk memastikan program konseling berjalan sesuai standar dan mencapai hasil yang diharapkan"(Sink 2009). Penelitian sebelumnya oleh Brigman dan Campbell menunjukkan bahwa bimbingan rutin dan arahan dari pengawas BK dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan konseling di sekolah (Maurer 2020). Hal ini diperkuat Miller mengemukakan; "Pengawasan dan evaluasi dari pihak berwenang dapat membantu dalam peningkatan kualitas layanan bimbingan dan konseling" (Miller, 2020). Penelitian juga menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif dari pihak berwenang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja konselor (Johnson , 2017).

Implikasi dari penelitian ini dapat mengembangkan transparansi kinerja bimbingan dan konseling yang berdampak kepada peningkatan kepercayaan masyarakat sekolah khususnya siswa dalam menerima pelayanan konseling. Disamping itu hasil penelitian ini membantu mengembangkan kemajuan pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah dan berkontribusi perkembangan kemajuan pendidikan visi misi sekolah.

5. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan akuntabilitas dalam layanan bimbingan dan konseling di SMKN 1 Bukittinggi, diperlukan pengembangan SOP yang lebih seragam dan akuntabel, penambahan sumber daya manusia yang memadai, peningkatan penggunaan teknologi dalam pemantauan dan evaluasi, serta bimbingan dan pengawasan rutin dari Dinas Pendidikan. Implementasi solusi-solusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan BK dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada siswa dalam mencapai perkembangan akademik dan personal yang optimal. Penelitian ini masih terdapat keterbatasan diantaranya; metode penelitian ini belum mengkombinasikan dengan penelitian kuantitatif sehingga kedepannya diperlukan metode yang lebih komprehensif. Disamping itu penelitian ini masih terbatas pada aspek akuntabilitas dan diperlukan pengembangan penelitian pada berbagai aspek lain yang lebih luas dan komprehensif.

6. Ucapan Terimakasih

Terimakasih diucapkan kepada pihak dan warga sekolah SMKN 1 Bukittinggi yang telah berkenan memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melakukan penelitian dilokasi tersebut.

7. Daftar Pustaka

- Badrujaman, Aip, Meithy Intan Rukia Luawo, and Wening Cahyawulan. 2018. "Accountability of Layanan Dasar by School Counselor in Junior High School in East Jakarta on School Principals Perspective." *Konselor* 7(4):145-50.
- Barak, A., Boniel-Nissim, M., & Suler, J. (2008). Fostering empowerment in online support groups. **Computers in Human Behavior, 24*(5), 1867-1883.*
- Clark, T., & Elliott, R. (2019). Implementing Accountability Measures in Counseling Services: A Practical Guide. **Journal of Educational Counseling, 21*(4), 303-320.*
- Cooper, M., & McLeod, J. (2011). Person-centered therapy: A pluralistic perspective. **Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 10*(4), 210-224.*
- Corey, G. (2013). **Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy**. Belmont, CA: Brooks/Cole.
- Davis, K., & Moore, S. (2016). Resistance to Accountability in Counseling Practices. **Counseling Psychology Review, 22*(1), 76-89.*
- Erford, B. T. (2015). **Transforming the School Counseling Profession**. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Firman, Firman, Yeni Karneli, and Rezki Hariko. 2018. "Improving Students' Moral Logical Thinking and Preventing Violent Acts Through Group Counseling in Senior High Schools." *Advanced Science Letters* 24(1):24-26.
- Fitriani, Erda, Neviyarni Neviyarni, Mudjiran Mudjiran, and Herman Nirwana. 2022. "Problematika Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah." *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* 1(3):174-80.
- Gladding, Samuel T., and Jamie E. Crockett. 2019. "Religious and Spiritual Issues in Counseling and Therapy: Overcoming Clinical Barriers." *Journal of Spirituality in Mental Health* 21(2):152-61.
- Johnson, David, and Michael Jones. 2018. "Barriers to Effective Accountability in Counseling Services." *Journal of Counseling Practice* 10(2):123-34.
- Kim, S., & Lee, H. (2021). Technology in Counseling Accountability: Innovations and Challenges. **Journal of Counseling Technology, 12*(2), 98-115.*
- Maurer, Christian. 2020. "'The Grievances from Toleration': Scotland Heading towards the Enlightenment." *Global Intellectual History* 5(2):247-63.
- Niles, Spencer G., and Joann Harris-Bowlsbey. 2022. *Career Development Interventions 5th Edition. Vol. 2.* New York, USA: Pearsaon.
- Rønnestad, M. H., & Skovholt, T. M. (2003). The journey of the counselor and therapist: Research findings and perspectives on professional development. **Journal of Career Development, 30*(1), 5-44.*
- Sari, M. (2019). Implementasi akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling di sekolah menengah Jakarta. **Jurnal Pendidikan dan Konseling, 11*(2), 75-89.*
- Sink, C. A. (2009). School counselors as accountability leaders: Another call for action. **Professional School*

Counseling, 13*(2), 68-74.

Sue, D. W., & Sue, D. (2016). *Counseling the Culturally Diverse: Theory and Practice*. Hoboken, NJ: Wiley.

Sutrisno, A. (2020). Challenges in Implementing Counseling Accountability in Indonesian Schools. *Journal of Southeast Asian Educational Studies*, 15*(3), 214-227.

Thompson, A. (2015). The Role of Standards in Counseling Accountability. *Counseling Today*, 7*(1), 45-60.

Walker, R. (2017). Evaluating Counselor Performance: Challenges and Solutions. *Professional Counseling Journal*, 15*(3), 200-215.

Whiston, S. C., & Sexton, T. L. (1998). A review of school counseling outcome research: Implications for practice. *Journal of Counseling & Development*, 76*(4), 412-426.

Wibowo, A. (2017). Tantangan dalam mengukur hasil bimbingan dan konseling di sekolah menengah Yogyakarta. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 5*(3), 123-134.